

2022



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



LAPORAN KINERJA

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kata Pengantar

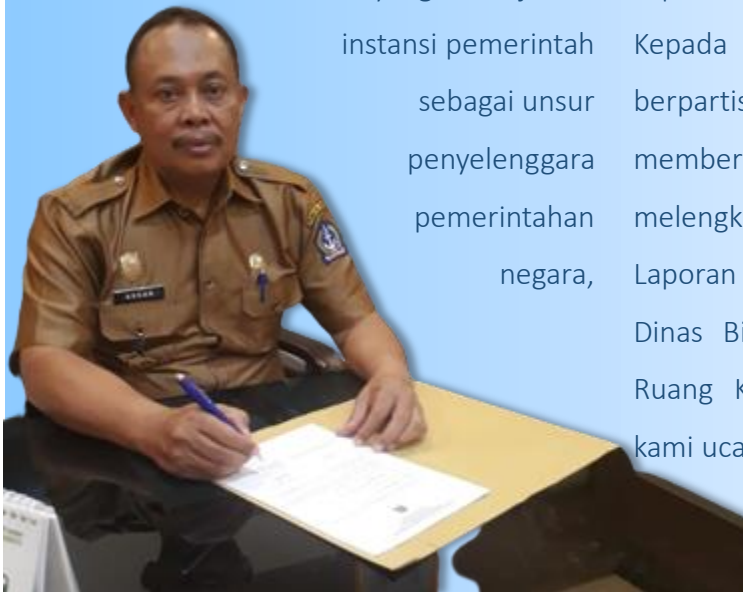
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara,

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah LKjIP Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone Tahun 2022 yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu memberikan data dan informasi dalam melengkapi dan menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone Tahun 2022 ini, kami ucapkan terima kasih.



Watampone, 14 Februari 2023

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone,


H. ASKAR, S.ST., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19681231 199803 1 042

Daftar Isi

1

Pendahuluan

Umum	1
Organisasi	2
Isu Strategis	4
Aspek Strategis Organisasi	5

2

Perencanaan Kinerja

Tujuan dan Sasaran	6
Strategi dan Arah Kebijakan	8
Indikator Kinerja Utama	9
Perjanjian Kinerja	10
Standar Penilaian Kinerja	11

3

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	12
Realisasi Anggaran	33

4

Penutup

Simpulan Umum	36
Kendala Pelaksanaan	37

BAB 1



PENDAHULUAN

A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

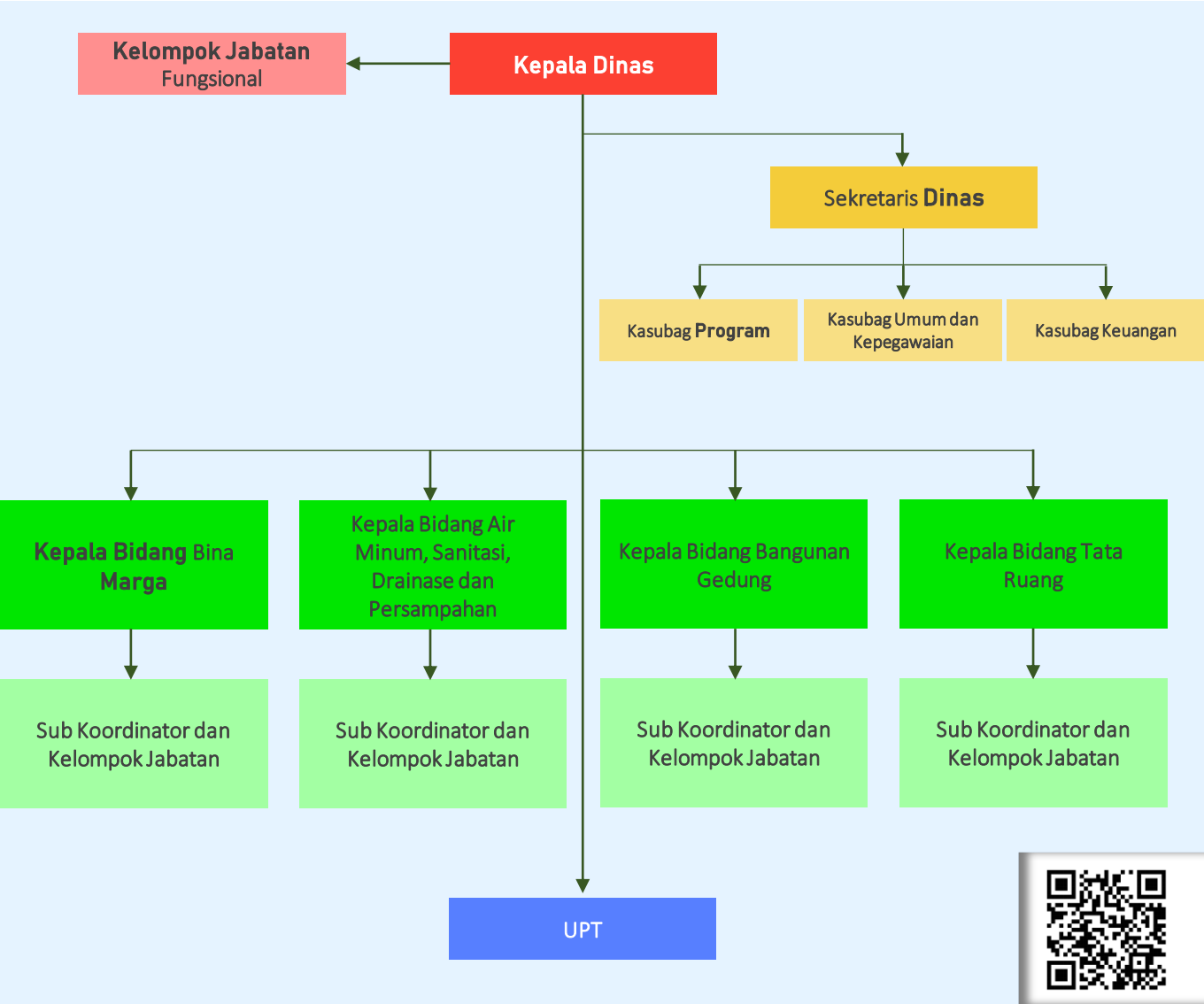
Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Organisasi

Perubahan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan kepada Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

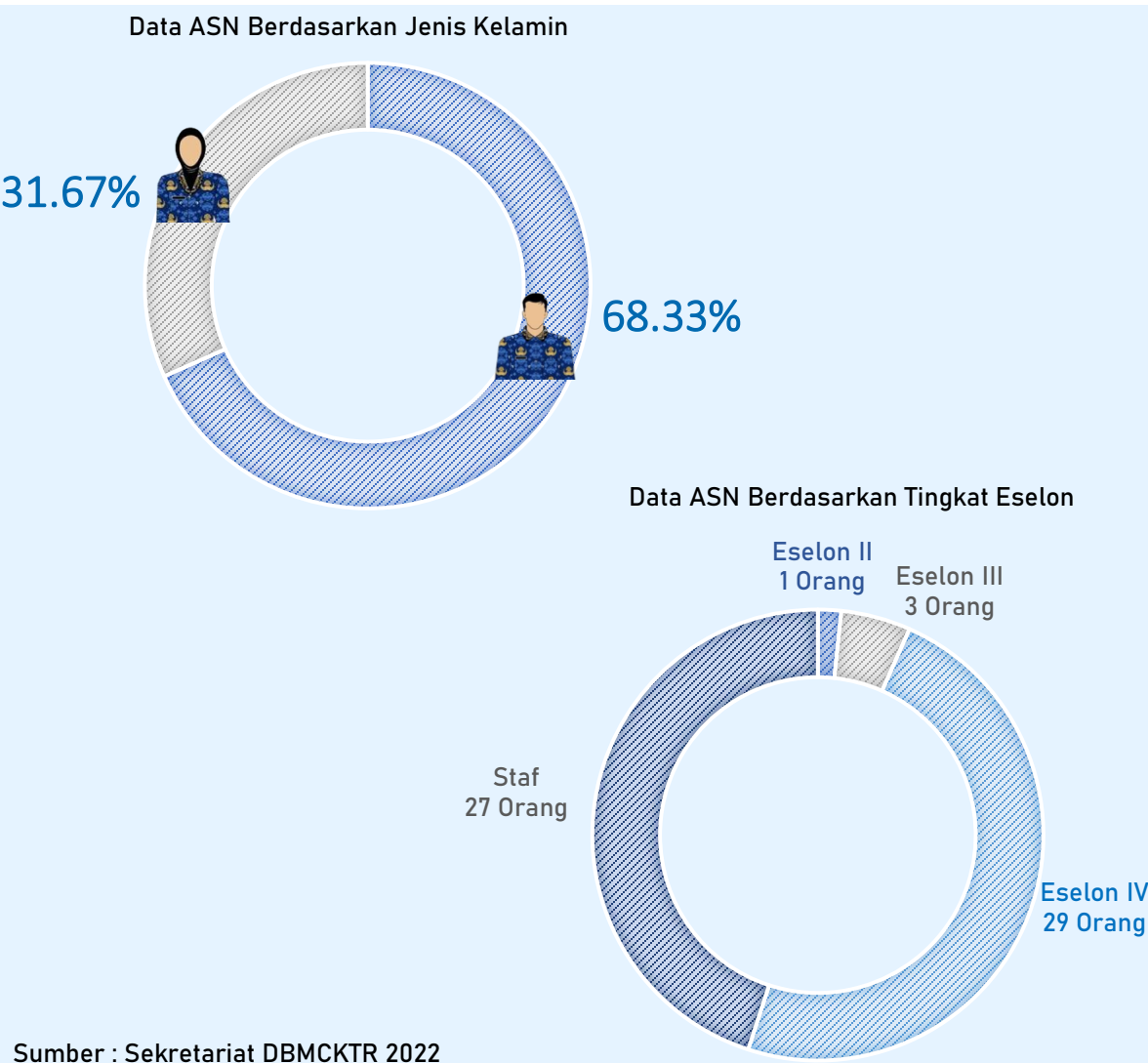
Gambar 1.1. Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone didukung dengan sumber daya pegawai sebanyak 130 orang yang terdiri atas seorang kepala dinas, seorang sekretaris, 2 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian, 11 orang sub koordinator, 9 orang kepala UPT, 7 orang kepala tata usaha UPT, yang ditunjang dengan keberadaan 97 orang staf dan fungsional (27 berstatus ASN dan 70 berstatus Non-ASN).

Gambar 1.2. Data ASN pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone



C. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Bina Marga, Cipta

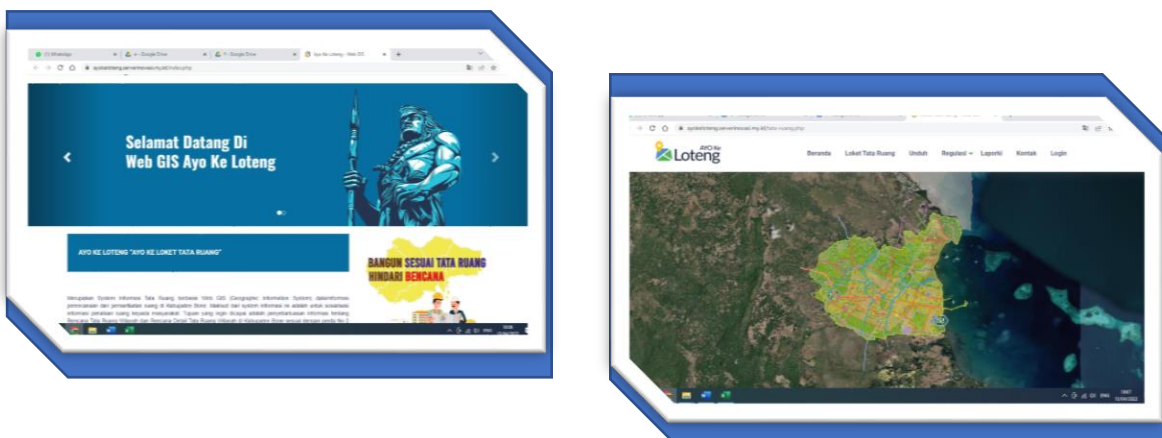
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.
2. Belum optimalnya sistem pemenuhan akses air minum beberapa wilayah di Kabupaten Bone.
3. Belum optimalnya Sistem pelayanan air limbah domestik rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Bone.
4. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi gedung.
5. Belum optimalnya pengolahan sampah di Wilayah Kabupaten Bone
6. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam meningkatkan kinerja organisasi maka diperlukan inovasi yang menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone pada Tahun 2022 antara lain :

Gambar 1.3. Inovasi Ayo Ke Loteng



Sumber : Bidang Tata Ruang

Merupakan System Informasi Tata Ruang berbasis Web GIS (Geographic Information System) data/informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone. Maksud dari system informasi ini adalah untuk sosialisasi informasi penataan ruang kepada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bone sesuai dengan perda No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2033 dan Perda No 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2017-2037, agar mudah di akses oleh masyarakat, investor dan stakeholder yang membutuhkan atau memanfaatkan ruang di Kabupaten Bone.

AYO KE LOTENG “Ayo Ke Locket Penataan Ruang”

BAB 2



PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas kemudian dirumuskan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

SASARAN

1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

SASARAN

2

Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang

Tabel 2.1. Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke -					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja berdasarkan nilai evaluasi SAKIP	CC	B	B	B	BB	A
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	50-60	60-70	60-70	60-70	70-80	80-90
2	Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang	Indeks Layanan Infrastruktur	-	-	-	100%	100%	100%
2.1	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	59,18	60,16	61,14	71,79	72,29	72,79
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	-	-	-	79,25	82,50	84,30
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	79	80,50	81,90
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	-	-	-	69,75	70	70,50
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	97,80	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra DPU-PtR 2018-2023 dan Perubahan Renstra DBMCKTR 2018-2023



Scan disini
untuk melihat Renstra Perubahan DBMCKTR

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Selain diperlukan strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran juga diperlukan kebijakan. Kebijakan yang diambil Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yaitu ;

Tabel 2.2. Strategi dan arah kebijakan

VISI		Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera	
MISI 1		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas manajemen kinerja Dinas BMCKTR secara berkelanjutan	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
MISI 4		Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketersediaan layanan Infrastruktur Daerah (Perdesaan dan Perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan Fungsi Tata Ruang.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang.	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan.	Menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas manusia (disabilitas dan non disabilitas) untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
		Penyusunan dan pemutakhiran data base kondisi jalan/jembatan.	Menyiapkan sistem informasi jalan/jembatan yang mutakhir dan akurat.
		Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebinamargaan.	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai fungsi dan kegunaannya untuk mendukung kinerja ke-PU-an.
		Membuat dokumen Rencana Tata Ruang yang berkualitas dan berkekuatan hukum.	Melaksanakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas.
		Pemenuhan kebutuhan air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.	Melaksanakan dan mengelola sistem pembangunan air minum secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bone dan mendorong Pengelolaan sistem air minum melalui penguatan kelompok swadaya masyarakat.
		Pengelolaan sistem sanitasi yang baik diseluruh wiayah Kabupaten Bone.	Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik diperdesaan dan perkotaan dan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan.

Sumber : Perubahan Renstra DBMCKTR 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	<i>Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP</i>	Sekretariat	DBMCKTR
2.	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{jumlah total panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	DBMCKTR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	$\frac{\text{jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten Bone}} \times 100\%$	Bidang ASDP	DBMCKTR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Bone}} \times 100\%$	Bidang ASDP	DBMCKTR
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	$\frac{\text{jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{jumlah bangunan pemerintah}} \times 100\%$	Bidang Bangunan Gedung	DBMCKTR
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	$\frac{\text{Realisasi RTR}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	DBMCKTR

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	70-80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.058.430.531
2	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	72,29%	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 432.088.213.038
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	82,50%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9.806.737.303
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,50%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 6.238.838.800
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.745.954.200
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 40.000.000
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	70%	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 19.947.242.680
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 13.364.799.720
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	100%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.026.185.553
		Jumlah			

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone 2022



Scan disini

untuk melihat Perjanjian Kinerja DBMCKTR



E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Standar Pencapaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x = 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

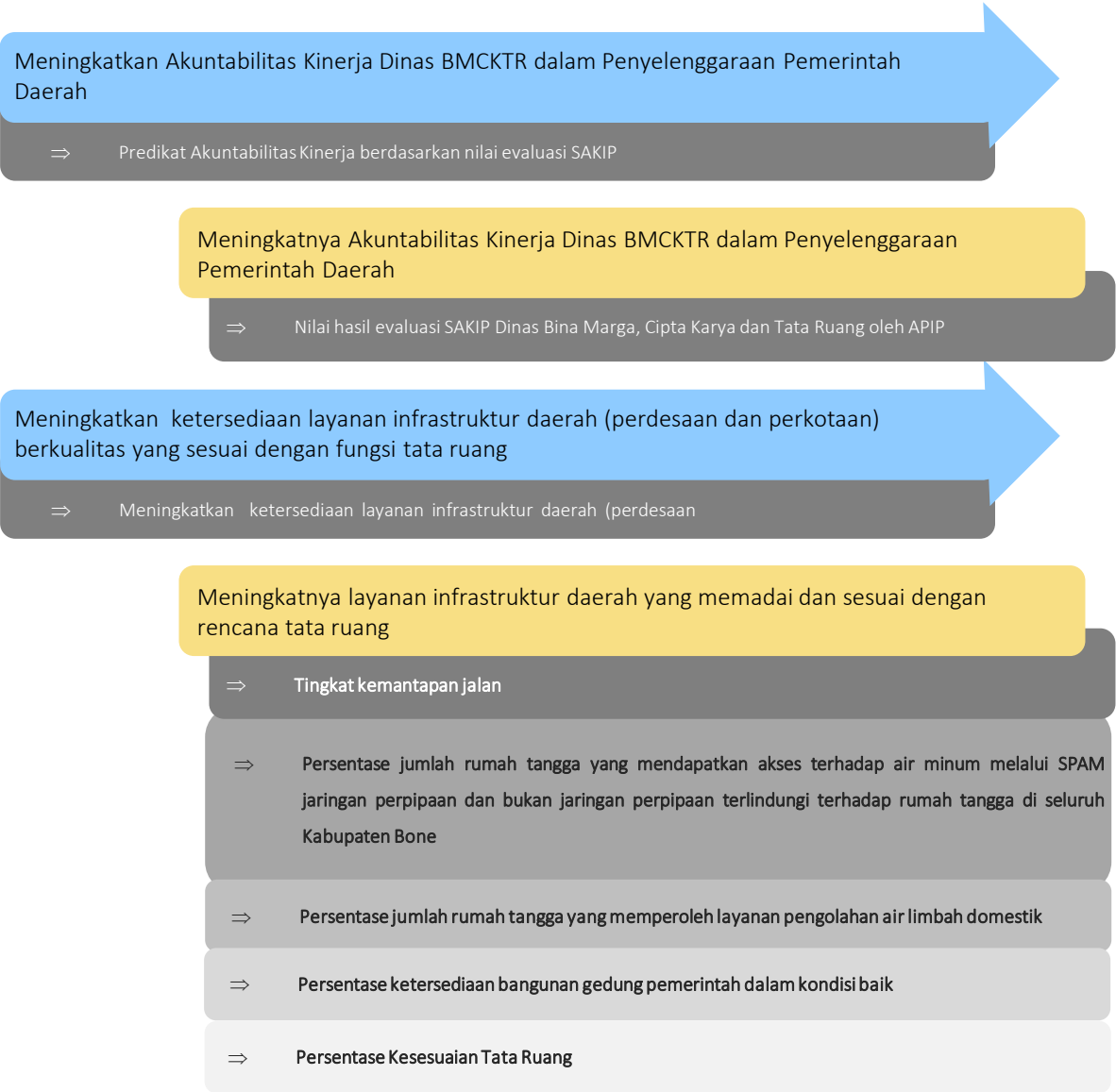
BAB 3



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone meliputi:



Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	70-80	*81,89	109,19%	Tercapai
2	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	72,29%	59,65%	82,51%	Cukup tercapai
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	82,50%	75,41%	91,41%	Tercapai
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,50%	82,22%	102,14%	Tercapai
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	70%	35,87%	51,24%	Belum tercapai
		Persentase kesesuaian tata ruang	100%	100%	100%	Tercapai
					89.41%	Cukup Tercapai

Sumber : Hasil analisis 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3.1. capaian kinerja sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dari setiap indikator kinerja memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 89.41% pada tahun 2022 atau dapat dikatakan tercapai.

Pada sasaran strategis pertama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP mempunyai target nilai antara 70-80 dan realisasi nilai SAKIP sebesar 81,89 sehingga diperoleh capaian sebesar 109.19% termasuk dalam kategori “tercapai”.

Sedangkan pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang” diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Tingkat kemantapan jalan dengan target 72,29% dan realisasi sebesar 59,65% sehingga diperoleh capaian sebesar 82,51% dapat dikategorikan “cukup tercapai”. Tingkat kemantapan jalan kabupaten dapat diperoleh dengan perbandingan antara jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dan jumlah total panjang jalan kabupaten.
- b. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone adalah perbandingan antara jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten dan jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten Bone. Indikator kinerja tersebut memiliki target sebesar 82,50% dengan realisasi sebesar 75,41% sehingga capaian diperoleh sebesar 91,41% dapat dikategorikan “tercapai”.
- c. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik merupakan perbandingan antara penjumlahan total rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT, dan rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD terhadap jumlah rumah di Kabupaten Bone. Indikator kinerja ini memiliki target sebesar 80,50% dengan realisasi sebesar 82,22% sehingga diperoleh capaian sebesar 102,14% dapat dikategorikan “tercapai”.
- d. Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik dengan jumlah bangunan pemerintah. Target dari indikator kinerja ini sebesar 70% dengan realisasi 35,87% sehingga didapat capaian sebesar 51,24% dikategorikan “tidak tercapai”.
- e. Persentase kesesuaian tata ruang merupakan perbandingan antara realisasi rencana tata ruang dan rencana peruntukan. Target kinerjanya sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100% dapat dikategorikan “tercapai”.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:



Scan disini
untuk melihat Data Dukung Capaian IKU DBMCKTR

Tabel 3.2. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	-	62,21	69,72	70,95	81,89	-	100	100	101,36	*109,19	-
2	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	59,19	60,20	72,79	69,39	69,65	-	100,06	119,05	97,33	82,51	-
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	-	-	-	71	75,41	-	-	-	89,59	91,41	-
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	-	83,51	82,22	-	-	-	105,71	102,14	-
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	-	-	-	34,75	35,85	-	-	-	49,82	51,24	-
		Persentase kesesuaian tata ruang	97,80	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

Sumber : Hasil analisis 2022

Pada tabel 3.2. menunjukkan pengukuran kinerja dari tahun 2018 hingga 2023 yang dapat memberikan gambaran tentang peningkatan atau penurunan kinerja. Adapun perbandingan antara sasaran strategis dan indikator kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator kinerja nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP realisasi pada tahun 2022 81,89 dengan capaian kinerja 102,36%. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 70,95 dengan capaian sebesar 101,36%. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja pada indikator kinerja tersebut.
- b. Sasaran strategis : meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang.
 - 1) Indikator 1 : tingkat kemantapan jalan, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 69,39% dengan capaian sebesar 97,33% dan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 69,65% dengan capaian 82,51% dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan capaian kinerja.

- 2) Indikator 2 : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 75,41% dengan capaian sebesar 91,41%, sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi kinerja sebesar 71% dengan capaian 89,59%. Dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan capaian kinerja.
- 3) Indikator 3 : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 82,22% dengan capaian sebesar 102,14% sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi kinerja sebesar 83,51% dengan capaian 105,71%. Dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini mengalami penurunan capaian kinerja.
- 4) Indikator 4 : Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik pada tahun 2021 diperoleh sebesar 34,75% dengan capaian sebesar 49,82%. sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 35,87% dengan capaian 51,24%. Dengan membandingkan capaian tahun 2021 dan 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan capaian kinerja.
- 5) Indikator 5 : Persentase kesesuaian tata ruang. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Untuk tahun 2022 realisasi kinerjanya juga sebesar 100% dengan capaian 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tetap.

3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	80-90	62,21	69,72	70,95	81,89	-
2	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	72,79	60,20	72,79	69,39	59,65	-
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	84,30	-	-	71	75,41	-
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,90	-	-	83,51	82,22	-
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	70,50	-	-	34,75	35,87	-
		Persentase kesesuaian tata ruang	100,00	100	97,80	100	100	-

Sumber : Hasil analisis 2022

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No.	Jenis Pelayanan SPM	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	89,27
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	79,53

Pada tahun 2022, Kabupaten Bone berkontribusi sebesar 100% dari target kabupaten terhadap capaian realisasi penerapan SPM air minum Nasional yang mencapai 89,27% dan sebesar 100% dari target kabupaten terhadap capaian realisasi penerapan SPM Sanitasi Nasional yang mencapai 79,53%.

Data capaian penerapan SPM air minum Kabupaten Bone tahun 2022, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone melalui Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Persampahan membangun SPAM yang mampu melayani ±4732 jiwa. Sedangkan untuk penerapan SPM sanitasi melayani 642 rumah tangga.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5. Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Predikat			
				> 110	90 =<s/d<110	60 =<s/d<90	< 60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	*109,19	√			
2	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	82,51	√			
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	91,41	√			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	102,14	√			
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	51,24	√			
		Persentase kesesuaian tata ruang	100,00	√			
		Rata-Rata Capaian	89,42	√			

Sumber : Hasil analisis 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.5. dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone tahun 2022 dalam kategori cukup berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran 1.1. : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capaian rata-rata 109,19% yang menunjukkan predikat Berhasil. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung oleh kualitas dokumen perencanaan dalam Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.

Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengukuran kinerja individu belum maksimal.
- 2) Pelaksanaan evaluasi internal yang belum optimal setiap periode waktu tertentu.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk meningkatkan nilai hasil evaluasi SAKIP antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan dalam dokumen perencanaan terutama terkait konsistensi data antar dokumen.
- 2) Melakukan perbaikan dokumen yang menjadi penilaian SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review inspektorat kabupaten Tahun 2021.
- 3) Melakukan penyesuaian kinerja sampai dengan level staf.

Tujuan 2: Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang dengan indikator.

Sasaran 2.1. : Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang dengan 5 (lima) indikator kinerja menunjukkan predikat cukup berhasil.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1) Tingkat kemandapan jalan

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian indikator tingkat kemandapan jalan dalam kategori **cukup berhasil**, yaitu dengan target 72,29%, realisasi sebesar 59,65% dan capaian sebesar 82,51%.

Pencapaian di atas tidak memenuhi target karena terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Terjadinya perubahan klasifikasi dalam penilaian tingkat kemantapan jalan.
2. Terbatasnya penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk meningkatkan tingkat kemantapan jalan, antara lain:

1. Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan.
2. Mencari sumber penganggaran tambahan diluar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone dalam kategori berhasil, yaitu dengan target 82,50%, realisasi sebesar 75,41% dan capaian sebesar 91,41%.

Pencapaian di atas tidak memenuhi target dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah rumah tangga di Kabupaten Bone, sedangkan pembangunan SPAM yang dilaksanakan terbatas sesuai dengan anggaran yang diberikan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk meningkatkan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone yaitu berupaya adanya penyediaan alokasi dana yang memadai dalam penanganan SPAM.

3) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dalam kategori berhasil, yaitu dengan target 80,50%, realisasi sebesar 82,22% dan capaian sebesar 102,14%. Hal ini disebabkan oleh tersedianya dukungan pendanaan pengelolaan air limbah domestik baik dari dana yang bersumber dari DAU maupun DAK.

Pencapaian di atas telah memenuhi target namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu belum tersedianya IPLT di Kabupaten Bone sehingga belum terdapat pelayanan pengolahan air limbah di IPLT yang dapat meningkatkan capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk meningkatkan persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, yaitu mengupayakan adanya alokasi dana yang memadai dalam pengolahan air limbah.

4) Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dalam kategori tidak berhasil, yaitu dengan target 70%, realisasi sebesar 35,87% dan capaian sebesar 51,24% hal ini disebabkan minimnya penganggaran untuk pemeliharaan bangunan gedung pemerintah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik adalah dengan mengupayakan adanya alokasi dana yang memadai dalam pemeliharaan bangunan gedung.

5) Persentase kesesuaian tata ruang

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa capaian persentase kesesuaian tata ruang dalam kategori berhasil, yaitu dengan target 100%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh terlaksananya sosialisasi tentang tata ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dipahami oleh masyarakat.

Pencapaian di atas telah memenuhi target, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. terdapatnya kawasan Ruang Terbuka Hijau yang kepemilikannya dikuasai oleh masyarakat (belum dilakukan pembebasan lahan) sehingga dapat menjadi potensi konflik dengan masyarakat pemilik lahan dalam pemanfaatan kawasan tersebut.
2. Besarnya garis sempadan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watampone yang melebihi besaran garis sempadan jalan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone untuk meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang, antara lain:

1. Mendorong instansi terkait untuk melakukan kegiatan pembebasan lahan pada ruang terbuka hijau yang kepemilikannya dikuasai oleh masyarakat.
2. memprogramkan revisi peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang dengan menyelaraskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tercipta kepastian hukum yang jelas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.6. Efisiensi sumber daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	$e = (d/c \times 100\%)$	f	g	$h = (g/f \times 100\%)$	$i = (e-h)$
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	70-80	*81,89	109,19	10.058.430.531	9.219.244.774	91,66	10,71
Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	72,29	59,65	82,51	432.088.213.038	358.421.614.328	82,95	(0,44)
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone	82,5	75,41	91,41	9.806.737.303	8.522.611.251	86,91	4,50
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80,5	82,22	102,14	9.024.793.000	8.788.971.850	97,39	4,75
	Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	70	35,87	51,24	33.312.042.400	18.665.442.796	56,03	(4,79)
	Persentase kesesuaian tata ruang	100	100,00	100,00	1.026.185.553	868.302.569	84,61	15,39
Rata-Rata				89,42			83,26	

Sumber : Hasil analisis 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP dengan capaian kinerja 109,19 % dan capaian anggaran 91,66% menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 10,71% dan efektivitas anggaran sebesar 8,34%.
2. Indikator tingkat kemandapan jalan dengan capaian kinerja 82,51% dan capaian anggaran 82,95% menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar - 0,44% dan efektivitas anggaran sebesar 17,05%.
3. Indikator persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone dengan capaian kinerja 91,41% dan capaian anggaran 86,91% menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 4,50% dan efektivitas anggaran sebesar 13,09%.
4. Indikator persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian kinerja 102,14% dan capaian anggaran 97,39% menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 4,75% dan efektivitas anggaran sebesar 2,61%.
5. Indikator persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 51,24% dan capaian anggaran 56,03% menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar -4,79% dan efektivitas anggaran sebesar 43,97%.
6. Indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 84,61% menunjukkan bahwa efisien penggunaan sumber daya sebesar 15,39% dan efektivitas anggaran sebesar 15,39%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bone

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP	*109,19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100	96	96	Akan ditindaklanjuti dengan memaksimalkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan dalam 1 tahun	100	100	100	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	2	2	100	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang tersusun (laporan)	12	12	100	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (laporan)	12	12	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan Pegawai Perangkat Daerah	100	100	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan gaji dan tunjangan ASN	12	12	100	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pegawai Perangkat Daerah	100	80	80	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi ASN yang tersedia (pasang)	65	65	100	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti (laporan)	16	-	-	Akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada ASN akan pentingnya mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas kinerja.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor	100	100	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (paket)	12	12	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik makan dan minum kebutuhan operasional kantor tersedia (Paket)	12	12	100	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK dan penggandaan tersedia dalam setahun (paket)	12	12	100	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan media elektronik, koran dan tabloid (media)	1.140	1.140	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Kabupaten (laporan)	12	12	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dan Alat Berat Kebutuhan Kantor Setiap Tahun	100	95	95	Akan ditindaklanjuti dengan pengadaan barang menggunakan e-katalog sehingga mudah memperoleh barang dengan harga yang sesuai spesifikasi.
				Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang tersedia (paket)	7	6	86	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya tersedia (laporan)	12	12	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran/ Jasa Operasional Kantor	100	100	100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rekening)	276	276	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran jasa pelayanan umum kantor (laporan)	12	12	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas dalam setahun (laporan)	12	12	100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Laporan pemeliharaan Alat Besar (Laporan)	12	12	100	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara (paket)	12	12	100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor di Dinas BMCKTR (laporan)	2	2	100	
2	Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang	Tingkat kemantapan jalan	82,51	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN (%)	72,29	59,65	82,51	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Jalan Kabupaten	100	310	310	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen teknis jalan yang direncanakan (Dokumen)	4	4	100	
				Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang di legalisasi (Km)	3	3	100	
				Survei Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah laporan Suvey Kondisi jalan dan jembatan (laporan)	1	1	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	10	53	532	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (Km)	5	40	794	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	5	58	1.159	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Rutin) (Km)	108	350	324	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	60	203	338	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (Rutin) (Meter)	100	203	203	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DENGAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	100	899	899	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis	100	899	899	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur permukiman kawasan strategis yang ditangani (Km)	8	72	899	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan di seluruh Kab. Bone	91,41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM SEHARI-HARI (SPM)	100	105	105	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	105	105	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Teknis Pengelolaan SPAM (Dokumen)	4	4	100	
				Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Jumlah pengawasan teknis Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (Dokumen)	4	4	100	
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan SPAM dengan perpipaan di Kawasan perkotaan (Paket)	4	4	100	
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan SPAM dengan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Paket)	35	38	109	
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang mengalami peningkatan volume dan sarana di Kawasan Perdesaan (Paket)	3	3	100	
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditambah Jangkauan Pelayanan di Kawasan Perkotaan (Paket)	1	1	100	
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang Ditambah Jangkauan Pelayanan di Kawasan Perdesaan (Paket)	12	12	100	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	102,14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPM)	100	100	100	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Dok)	4	4	100	
				Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengawasan teknis Pembangunan dan Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman (Paket)	1	1	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pembangunan dan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Paket)	13	13	100	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH KABUPATEN YANG TERTANGANI	70	100	143	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	100	100	100	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Teknis Pengelolaan Sampah Kewenangan Kabupaten. (dokumen)	1	1	100	
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	1	1	100	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE DRAINASE YANG DITANGANI	75	196	261	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan	100	196	196	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan teknis sistem drainase (dokumen)	4	4	100	
				Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah laporan Pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase (laporan)	3	3	100	
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Saluran drainase yang di Rehabilitasi (meter)	1.000	1.964	196	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
		Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	51,24	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH YANG DITANGANI	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	
				Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten Bone (%)	100	100	100	
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Laporan)	100	528	528	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun (unit gedung)	3	3	100	
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan triwulan Kegiatan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung (laporan)	4	4	100	
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelaporan Monev Penyelenggaraan Bangunan (laporan)	12	12	100	
				Identifikasi, Penetapan , Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan (Unit)	1	-	-	Akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain yang terkait.
				Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah dokumen pendaftaran huruf daftar nomor HDNo yang tersedia (dokumen)	1	-	-	Akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan HDNo
				Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Rumah Tinggal dalam penerbitan laik fungsi (laporan)	12	12	100	
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi (unit)	22	15	68	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG SESUAI DENGAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	100	50	50	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan dengan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Sesuai	100	50	50	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan (dokumen)	2	2	100	
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dalam lingkungan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya (unit)	2	-	-	Akan ditindaklanjuti dengan perbaikan target-target dalam perencanaan berikutnya
	Persentase kesesuaian tata ruang	100,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KEPATUHAN RTRW	100	91,67	91,67	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100	66,97	66,97	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (laporan)	3	2	66,97	Akan ditindaklanjuti dengan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan RRTR Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	100	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peninjauan Lokasi terhadap Pengajuan KRK dan Informasi Pemanfaatan Ruang (laporan)	12	12	100	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (laporan)	12	12	100	
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Ruang (laporan)	4	4	100	

Berdasarkan tabel 3.7. yang menunjukkan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator 1.1.1: Nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP.

Dengan target nilai 80 telah berhasil tercapai dengan nilai sebesar 81,89 atau capaian sebesar 109,19%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan 2: Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang dengan indikator

Sasaran 2.1: Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Indikator 2.2.1: Tingkat kemantapan jalan

dengan target 72,29%, realisasi sebesar 59,65% dan capaian sebesar 82,51% dapat dikategorikan cukup berhasil. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Jalan.

Indikator 2.2.2: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Bone.

dengan target 82,50%, realisasi sebesar 75,41% dan capaian sebesar 91,41% dapat dikategorikan berhasil. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Indikator 2.2.3: Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

dengan target 80,50%, realisasi sebesar 82,22% dan capaian sebesar 102,14% dapat dikategorikan berhasil. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Indikator 2.2.4: Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik. yaitu dengan target 70%, realisasi sebesar 35,87% dan capaian sebesar 51,24% dapat dikategorikan belum berhasil. Indikator ini dapat terlaksana melalui 2 (dua) program antara lain:

1. Program penataan bangunan gedung.
2. Program penataan bangunan dan lingkungannya.

Indikator 2.2.5: Persentase kesesuaian tata ruang.

yaitu dengan target 100%, realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100% dapat dikategorikan berhasil. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

8. Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1 : meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas BMCKTR dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Berupaya melakukan evaluasi terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpengaruh terhadap perbaikan dalam pencapaian kinerja yang ingin dicapai tahun selanjutnya.
2. Berupaya memperbaiki manajemen kinerja terutama pada setiap individu dalam Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone agar dapat bertanggung jawab atas target dan capaian kerjanya.
3. Berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone guna terciptanya hasil output kinerja yang berkualitas.
4. Berupaya menyediakan informasi kinerja yang dapat menginformasikan kinerja terukur secara akurat, tepat waktu dan handal.

Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan layanan infrastruktur daerah (perdesaan dan perkotaan) berkualitas yang sesuai dengan fungsi tata ruang dengan indikator

Sasaran 2.1 : Meningkatnya layanan infrastruktur daerah yang memadai dan sesuai dengan rencana tata ruang.

1. Mengoptimalkan alokasi anggaran terhadap program yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.
2. Mewujudkan ketersediaan data terkait pembangunan insfrastruktur oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone yang aktual dan berkesinambungan.
3. Memaksimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 495.316.401.825 (Empat ratus Sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh lima) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.058.430.531	9.219.244.774	91,66
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.353.420	238.434.650	82,40
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.743.440	105.369.150	78,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	131.554.680	118.182.050	89,83
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.055.300	14.883.450	64,56
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.773.731.051	5.605.931.229	97,09
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.773.731.051	5.605.931.229	97,09
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.292.000	46.500.000	37,41
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.500.000	46.500.000	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.792.000	-	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.268.369.760	1.137.892.200	89,71
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.074.260	131.217.650	87,44
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.625.000	114.675.000	99,18
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.852.500	42.852.450	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	73.320.000	63.635.000	86,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	886.498.000	785.512.100	88,61
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.943.900	202.305.030	45,06
	Pengadaan Mebel	78.195.300	54.447.300	69,63
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.748.600	147.857.730	39,88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.069.700.400	1.039.106.084	97,14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	112.754.748	98,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955.700.400	926.351.336	96,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.040.000	949.075.581	87,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.600.000	274.180.400	85,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	300.000.000	230.007.281	76,67
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.440.000	40.897.200	92,03
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	418.000.000	403.990.700	96,65
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.806.737.303	8.522.611.251	86,91
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.806.737.303	8.522.611.251	86,91

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	563.608.760	534.357.950	94,81
	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	412.549.342	408.221.000	98,95
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	425.000.000	423.609.000	99,67
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.715.598.500	3.652.545.500	98,30
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	357.500.000	356.378.000	99,69
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100.000.000	99.666.000	99,67
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.232.480.701	3.047.833.801	72,01
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	40.000.000	39.762.000	99,41
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota	40.000.000	39.762.000	99,41
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	10.000.000	9.867.000	98,67
	Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	30.000.000	29.895.000	99,65
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.238.838.800	6.082.665.700	97,50
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.238.838.800	6.082.665.700	97,50
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	1.149.794.000	1.012.324.600	88,04
	Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem	51.787.800	40.225.300	77,67
	Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman			
	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.037.257.000	5.030.115.800	99,86
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.745.954.200	2.666.544.150	97,11
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota	2.745.954.200	2.666.544.150	97,11
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	208.150.000	201.976.600	97,03
	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	179.972.000	156.683.900	87,06
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.357.832.200	2.307.883.650	97,88
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	30.145.951.360	22.464.678.795	74,52
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	30.145.951.360	22.464.678.795	74,52
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	30.145.951.360	22.464.678.795	74,52
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.947.242.680	14.692.775.796	73,66
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	19.474.193.500	14.269.826.096	73,28
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	473.049.180	422.949.700	89,41
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota	9.331.013.430	8.564.242.446	91,78
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	6.400.000	-	0,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	24.858.180	15.507.350	62,38
	Identifikasi, Penetapan , Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	122.211.680	80.991.250	66,27
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	26.034.180	4.376.150	16,81
	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	20.000.000	-	0,00
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.943.676.030	5.604.708.900	56,36
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.364.799.720	3.972.667.000	29,72
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13.364.799.720	3.972.667.000	29,72
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	763.233.690	557.710.350	73,07
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.601.566.030	3.414.956.650	27,10
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	401.942.261.678	335.956.935.533	83,58
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	401.942.261.678	335.956.935.533	83,58
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	693.162.320	625.879.200	90,29
	Pengelolaan Leger Jalan	108.058.010	100.861.950	93,34
	Survei Kondisi Jalan dan Jembatan	317.301.450	296.563.850	93,46
	Pembangunan Jalan	165.032.144.579	140.655.416.547	85,23
	Rehabilitasi Jalan	76.440.823.047	39.450.942.848	51,61
	Pemeliharaan Berkala Jalan	137.327.632.754	137.317.535.438	99,99
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.156.268.911	3.232.583.650	77,78
	Pembangunan Jembatan	17.627.028.707	14.211.673.150	80,62
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	239.841.900	65.478.900	27,30
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.026.185.553	868.302.569	84,61
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	53.103.130	19.404.800	36,54
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	53.103.130	19.404.800	36,54
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	699.385.765	607.260.300	86,83
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	699.385.765	607.260.300	86,83
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.000.228	56.908.100	81,30
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	70.000.228	56.908.100	81,30
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	203.696.430	184.729.369	90,69
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	65.161.530	51.811.519	79,51
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	138.534.900	132.917.850	95,95
	Total	495.316.401.825	404.486.187.568	81,66

BAB 4



PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone Tahun 2022 merupakan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perubahan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis capaian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone memiliki kategori pencapaian “Cukup Tercapai” dengan rata-rata capaian sebesar 89,42% didukung oleh capaian indikator nilai evaluasi SAKIP Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang oleh APIP sebesar 109,19% dan indikator persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 102,14%. Sedangkan hasil capaian kinerja keuangan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone sebesar 81,66%.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Meskipun pencapaian pada sasaran pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas BMCKTR dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sudah memenuhi target bahkan melebihi predikat yang ditargetkan namun demikian pencapaian tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat tentang penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan. Untuk itu perlu keikutsertaan aparat dalam pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perlu terus ditingkatkan mengingat peraturan peraturan terkait penyusunan tersebut terus menerus mengalami perubahan.
- b. Minimnya data dan informasi yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone menyebabkan pencapaian kinerja yang kurang optimal. Sehingga diperlukan adanya koordinasi lebih intens dengan instansi yang sebelumnya berwenang terhadap beberapa kegiatan keciptakarya.

LAMPIRAN

1.

Scan QR code berikut untuk mengunduh
Cascading Kinerja DBMCKTR Kabupaten Bone



2.

Scan QR code berikut untuk mengunduh
Rencana Aksi DBMCKTR Kabupaten Bone 2023



3.

Scan QR code berikut untuk mengunduh
Renja Perubahan DBMCKTR 2022



4.

Scan QR code berikut untuk mengunduh
Evaluasi Kinerja DBMCKTR 2022



5.

Scan QR code berikut untuk mengunduh
Pengukuran Kinerja DBMCKTR 2022

